

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG H.R.SOEBRANTAS
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Oleh:

INDRI KURNIADI
NIM : 10425025145

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG H.R. SOEBRANTAS PEKNBARU”**

Skripsi ini dilatarbelakangi karena berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip Syariah dan fenomena yang terjadi saat ini banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahn (sipemilik barang) dan menjadikan beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan tersebut.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahn. Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui proses mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru dan sebaliknya apakah proses dalam pelelangan jaminan tersebut sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan ketentuan – ketentuan syariat yang berlaku.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara kepada bagian operasional yang langsung terlibat dalam proses pelelangan benda jaminan tersebut. Dari hasil wawancara oleh peneliti bahwa proses pelelangan benda jaminan di pegadaian Syariah sebelum dilakukan pelelangan pegadaian memberikan somasi atau surat peringatan kepada si pemilik barang (Rahn) agar melunasi hutangnya dengan tempo waktu tujuh hari sebelum terjadinya pelelangan dan ketika proses pelelangan berlangsung barang jaminan yang tidak ditebus oleh si pemilik barang akan dilelang di depan umum dengan penetapan harga pasar saat ini apabila barang jaminan tersebut laku terjual dan mendapatkan keuntungan maka sisah dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi maka sisanya di berikan kepada si pemilik barang dan apabila terjadi kerugian maka si pemilik barang wajib melunasi hutangnya tersebut.

Dari mekanisme tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip Syariah karena untung dan rugi sama – sama ditanggung ke dua belah pihak.

Suatu kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses pelelangan benda jaminan gadai pada pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru lebih baik dan terbuka serta ke dua belah pihak diuntungkan dengan mekanisme tersebut.

Saran saya sebagai peneliti supaya pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru agar tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan terlebih lagi sistem ini harus disosialisasikan di tengah masyarakat supaya melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAK..... iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Batasan Masalah8

C. Rumusan Masalah9

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....9

E. Metodologi Penelitian.....10

F. Sistematika Penulisan.....12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sejarah Berdirinya dan Sistem Pegadaian Cabang Subrantas.....14

B. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah.....17

C. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah.....19

D. Struktur organisasi21

BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gagai.....27

B. Landasan Hukum Gadai29

C. Rukuun Gadai33

D. Syarat Gadai 35

BAB IV ANALISIS DATA

1. Proses Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Subrantas.....	45
2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Proses Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Subrantas.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG H.R. SOEBRANTAS PEKANBARU

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga keuangan non Bank milik Pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah

¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika cet II, 1996, hal. 140.

uang yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.²

Adapun latar belakang berdirinya pegadaian syari'ah yaitu bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Karena Bank Muammalah Indonesia sendiri masih belum punya manajemen skill dalam bidang ahli menaksir barang, adapun pegadaian sudah mempunyai ahli penaksir barang akan tetapi dananya sangat terbatas. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pegadaian dengan bank dengan prinsip bagi hasil.

Gadai dalam Fiqih (rahn) adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

UU Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

² Sugiyono (2005), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm.77.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.³

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Ar-Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan. Pengambilan kata gadai dengan istilah *rahn* itu terambil dari ungkapan Allah dengan kata “*farihaanu*” dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan

³ M. Nashiruddin Al-Albani (2005), *Ringkasan Shahih Muslim : Kitab Jual-Beli*, alih bahasa Elly Lathifah, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 457.

yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴

Kata *farihanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai *maka hendaklah ada barang tanggungan*. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya *yang dipegang (oleh yang berpiutang)*. Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 71.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat di penuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana masyarakat hanya menunjukan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu tidak relatif lama.

Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat atau dengan kata lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedur nya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Gadai merupakan salah satu kategori dari penjamin utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang sebagai jaminan terhadap hutang itu. Barang

jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi di kuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁵

Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual.

“Suwaid bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “ Janganlah sebahagian dari kamu membeli barang yang akan dibeli oleh sebahagian (temanmu)”⁶

Menurut *Ibnu Qudamah* tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain bila dalam praktek penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain itu ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian sampai pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya

⁵ Muh. Syafi’i Antonio (1999), *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, hlm.278.

⁶ A. Djazuli (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih*, *Ibid*, hlm.61.

tidak ditebus oleh *rahn*. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut. Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian Syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

Perbedaan sistem pelelangan di pegadaian Syariah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di pegadaian Syariah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Pegadaian Syariah pandau permai, kampar sebagai objek penelitian, karena pegadaian ini merupakan salah satu pegadaian Syariah di kampar yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan *marhun*. Sistem Serta kesesuaian pelaksanaannya dengan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yang mengatur tentang penjualan *marhun*.

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahn* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- c. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn.⁷

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum lelang dilakukan, pegadaian harus memberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Pelelangan yang akan dilakukan pegadaian juga harus memenuhi syarat-syarat yang dilakukan. Barang gadai tersebut dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh kepada perum pegadaian. Apabila terjadi kelebihan atau ada sisa uang penjualan barang gadai setelah dikurangi bunga, biaya perawatan atau biaya lelang, maka sisanya tersebut harus dikembalikan pada Debitur (pemberi gadai) dan Kekurangannya menjadi kewajiban rahn.

Meskipun pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya melalui pelelangan umum, tetapi dalam prakteknya mengalami hambatan baik secara yuridis, administratif maupun dalam masalah teknis dan implementasi.

Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat kedalam sebuah bentuk tulisan ilmiah guna untuk di kaji adapun permasalahan yang saya angkat dengan Judul **Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru**. Agar kita sebagai orang muslim bisa memahami akan konsep dasar pelaksanaan serta fungsi dan mamfaat dari adanya gadai dalam Islam yang sesuai

⁷ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* , PT. Intermedia.ed. 2, Jakarta, 2003, hal 155-159

dengan Syariah. Peneliti mengambil dan menganalisis dari penelitian yang berlokasi di Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti.

Adapun masalah yang diteliti adalah **Bagaimanah Proses Pelelangan benda jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru**

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru?
2. Bagaimanah Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Benda jaminan gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana proses lelang benda jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang Pelaksanaan lelang barang jaminan serta konsep Ekonomi Islam sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan.
- b. Secara Praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam konteks Islam, dan merupakan masukan bagi karyawan, orang-orang yang menggadaikan serta masukan bagi lembaga pegadaian tersebut.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di H.R. Soebrantas Pekanbaru–Riau karena peneliti melihat pegadaian tersebut sesuai dengan masalah yang diangkat dan sangat cocok untuk melakukan penelitian tentang proses pelaksanaan lelangan.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan lelang benda jaminan dalam pandangan Ekonomi Islam, sedangkan subjeknya pihak-pihak yang terkait di dalam pegadaian Syariah secara proposional.

3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan pegadaian Syariah dan karyawan bagian operasional pelelangan yang terlibat langsung dalam proses pelelangan tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang. Mengingat populasi sedikit maka penelitian ini tidak menggunakan sample.

Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari objek atau responden yang melaksanakan tugas dan bekerja pada pegadaian

syariah secara langsung, disesuaikan dengan kapasitas bagian masing-masing.

- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dokumen, arsip dan literatur –literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap pengurus Pengadaian dan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Studi dokumentasi, yaitu data yang diambil dari daftar yang berguna bagi penulis.

5. Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan Metode Analisa Data secara deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat

dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batas masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan bab tentang profil perum pegadaian syariah cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru meliputi sejarah berdirinya, status hukum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, Stuktur Organisasi dan Personalia.
- BAB III : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan Umum tentang Gadai yang meliputi tentang pengertian gadai, landasan hukum, rukun gadai, syarat gadai.
- BAB IV : pada Bab ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan lelang benda jaminan gadai dan pandangan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan lelang tersebut.
- BAB V : Bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi, disini dijelaskan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis atau yang di rekomendasikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam semakin marak pada akhir dasawarsa abad 20 ini. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang Undang No 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan beserta semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan berdirinya perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992 dan menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, kemudian disusul dengan asuransi yang berdasarkan syariat Islam atau takaful .

Dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaannya menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islami seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksadana Syariah. Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat

Islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahnu*, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusianya dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai. Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian. Perjanjian kerjasama antara Perum Pegadaian dan

Bank Muamalat Indonesia tentang Gadai Syariah disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002.

Bank syariah selain memback-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Gadai Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta tanggal 1 Januari 2003, kemudian di kota Jogjakarta, Semarang, Solo, Malang, Bandung, Padang, Denpasar, Balikpapan, Medan dan kota-kota besar lainnya. Khusus di wilayah Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal 15 September 2003 dengan alamat di Jalan Sudirman No. 184 Pekanbaru. Dengan melalui berbagai pertimbangan dan survey di lapangan maka pada tanggal 25 Mei 2004 Perum Pegadaian Kanwil Riau mendirikan Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru yang terletak di Jalan Soebrantas Pekanbaru Riau dengan tujuan untuk menampung nasabah yang anti terhadap riba atau masyarakat muslim yang selama ini takut ke pegadaian karena takut riba dan juga untuk menampung nasabah di sekitar wilayah Kecamatan Tampan. Gadai syariah masuk dalam Devisi Usaha Lain, karena diharapkan terjadi bisnis sehingga menjadi organisasi yang tidak tergantung hanya pada satu produk saja. Namun untuk kedepan diharapkan gadai syariah menjadi entitas bisnis yang mandiri dan menjadi PT sendiri.

2. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syari'ah tersebut antara lain.¹

a. Aspek Legalitas

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek ijon, *riba*, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijalankan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syari'ah.

b. Aspek Permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan

¹ Heri Soedarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrsi, Ekonosial*, (Jogjakarta, 2004), h. 165 – 166.

investasi untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan gadai syari'ah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*) atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti baik atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syari'ah (*mudharabah*).

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberlangsungan pegadaian syari'ah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian syari'ah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syari'ah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam dimana pegadaian itu berada.

d. Aspek Kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada maka sistem dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

f. Aspek Pengawasan

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan segala jenis masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi. Adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan

jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.

- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah.

4. Tugas Pokok Pegadaian Syariah

Unit Layanan Gadai Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur *riba* yang dilarang menurut syari'at Islam. Dalam kenyataannya di lapangan, sudah ada institusi lain yang menjawab tantangan ini dengan mengeluarkan produk gadai berprinsip syariah (*rahn*). Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi pegadaian, apabila ingin tetap eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini. Menyingkap perkembangan keadaan tersebut, maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang dikemudian hari diharapkan menjadi institusi Layanan Syari'ah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Oleh karena itu dibentuknya Unit Layanan Gadai Syariah ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara Syariah Islam.

5. Fungsi Pegadaian Syariah

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka Unit Layanan Gadai Syari'ah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syari'ah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke Cabang Layanan Syariah.

6. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Adapun yang menjadi struktur organisasi dalam lembaga pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru yaitu. Unit layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Devisi Usaha Lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk Kantor Cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut.

Adapun bagian - bagian organisasi Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:

- Manajemen
- Penaksiran
- Kasir
- Penyimpanan / Petugas ADM
- Penjaga Gudang

Keterangan:

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli di bidang iqih muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

a. Fungsi Dewan Pengawas Syariah Nasional antara lain adalah:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam

mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.

- 3) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

b. Fungsi Direksi antara lain adalah:

- 1) Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
- 2) Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Fungsi *General Manager* usaha lain dalam pembinaan Unit layanan Gadai Syariah adalah sebagai pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

d. Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit

layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.

e. Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah:

- 1) Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se Indonesia.
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan maupun rencana jangka panjang.
- 3) Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh Pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

f. Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah:

- 1) Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan

respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Manjer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).

2) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor CabangUnit Layanan Gadai Syariah Pimpinan Cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:

a) Penaksir bertugas manaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

b) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

c) Bagian Gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

- d) Bagian Keamanan bertugas menjaga keamanan Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah dan seluruh isi kantor baik siang atau malam.

7. Personalia

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah Cabang H.R Soebrantas Panam, Pekanbaru didukung oleh 6 orang staf atau karyawan. Keenam orang karyawan tersebut memiliki spesifikasi tugas yang berbeda-beda. Adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel2

Data pegawai Pegadaian Syaria

Cabang Soebrantas Pekanbaru Riau Tahun 2011²

No	Nama	Jabatan
1.	Slamet Yulianto	Manajer Cabang
2.	Putri Febrina	Penaksir
3.	Amsal Fuad	Kesir
4.	Dedi	Penjaga Siang
5.	Rianto	Penjaga Malam
6.	Sugiyino	Penjaga Malam
		Penjaga Malam

² Interview Dengan Manajer Cabang Unit Layanan Gadai Syaria'ah.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Tinjauan Umum Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Gadai menurut ketentuan syari'at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syari'at Islam, gadai adalah semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.¹

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika cet II, 1996), h. 140

biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.²

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.³

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”.⁴

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat

² *Ibid.*, h. 140.

³ *Ibid.*, h. 139.

⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159

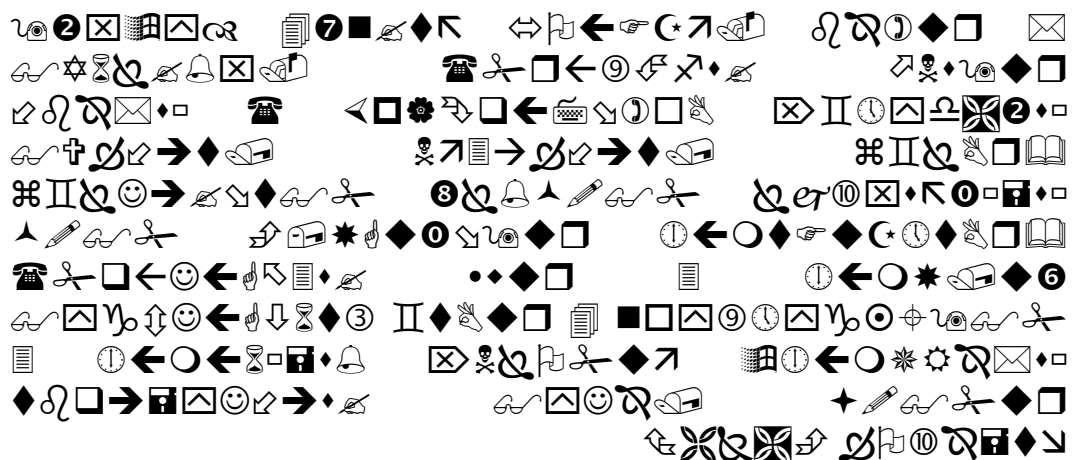
⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan aggunan dengan manfaat atau prestasi.

Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar persoalan dapat diselesaikan. Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara kepemilikan atas benda yang diserahkan.

Dengan perjanjian gadai 2 (dua) kepentingan sekaligus dapat terayomi, untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.

2. Landasan Hukum Gadai Syariah



Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q. S Al Baqarah: 283)⁶

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)’. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.⁷

b. As Sunnah

“Aisyah r.a. berkata Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari dan Muslim)⁸

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 71

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

⁸ Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : PT pena Pundi Aksara cet I, 2006), h. 1785

Anas r.a. berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (HR Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).⁹

Abi hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya." (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i)¹⁰

Abu hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda, "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan tanggungjawabnyalah bila ada kerugian (biaya)" (HR Syafi'i dan Daruqutni)¹¹

c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha*

⁹ *Ibid*, h. 1785.

¹⁰ *Ibid*, h. 1786.

¹¹ *Ibid*, h. 1787.

dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.¹²

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad* (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.¹³

3. Rukun Gadai Syariah

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonisia, Yogyakarta, 2003), h. 159

¹³ *Ibid*, hal 160

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain¹⁴:

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

1) Akad *Rahn*. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam

¹⁴ *Ibid*, hal 160

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

- 2) Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

4. Syarat Gadai Syariah

a. Rahin dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. Sighat

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (Utang)

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus diquantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.¹⁵

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat,
antara lain:

¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 164.

- 1) Harus bisa diperjual belikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

e. Syarat kesempurnaan *Rahn* (memegang barang) antara lain:

atas seizin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, *murtahin* harus tetap memegang *rahin*.

5. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang dilarang oleh syara'. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena

selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.¹⁶

6. Ketentuan Gadai dalam Islam

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.¹⁷

Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah; sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.

¹⁶ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003), hal. 3.

¹⁷ *Ibid*, h. 3

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut syara'.
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:¹⁸

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- 2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang

¹⁸ *Ibid*, h. 157.

tersebut tidak dapat digadaikan.

- 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.¹⁹

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* (barang gadaian) menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*.

¹⁹ *Ibid.* , h. 56

Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.²⁰

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.²¹

e. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

²⁰ *Ibid*, h. 82-83

²¹ *Ibid.* , h. 84

Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.²²

f. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syari'ah Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syari'ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Lain halnya dengan perum

²² *Ibid.* , h. 84

pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1) Barang Bergerak

- a) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
- b) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- c) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
- d) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

2) Barang Tak Bergerak

- a) *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.
- b) *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.

c) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.

d) *Marhun*/petugas penaksir menentukan nilai taksir

Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria:

- 1) Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengan syariah.
- 2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak.
- 3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

g. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya.

Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka

hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Tinjauan Umum Tentang Lelang

1. Analisis Pelelangan benda jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah

Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹

Pengertian di muka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Aturan lelang harus dilaksanakan di muka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintah maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada

¹ Sibarani, *Jurnal Hukum Nasional* No.2, III, 2001

mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada *marhun* lelang tersebut pada saat lelang).

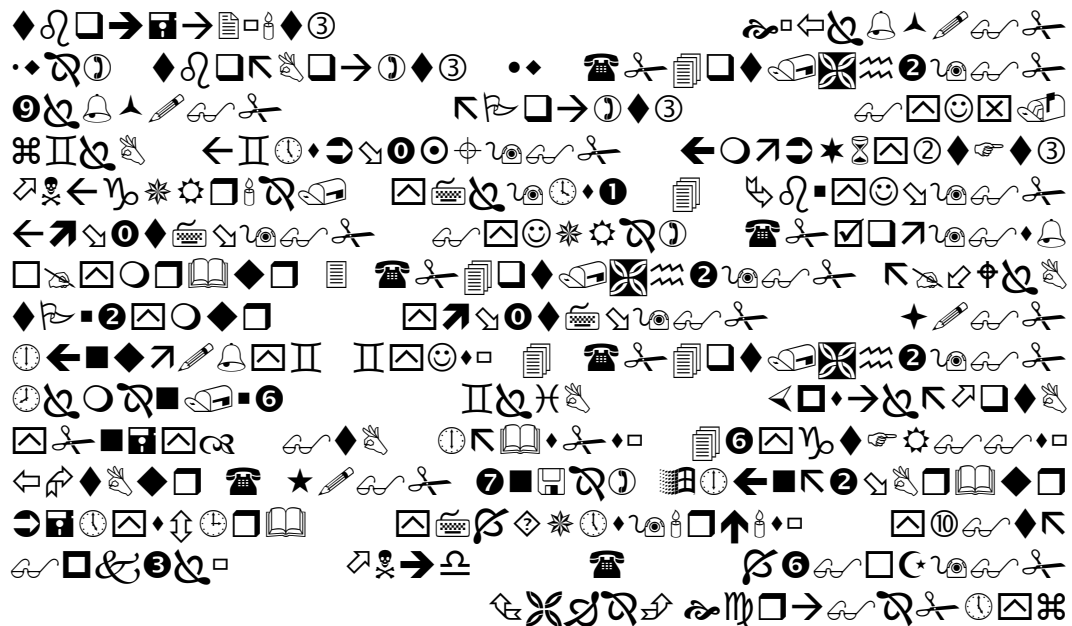
Penjualan *marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*Marhun Bih*) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.² Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh ULGS.

² Tim Penulis DSN-MUI, *op. cit.*, h. 159

2. Dasar Hukum Lelang

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (*dikiyaskan*) dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Di mana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.

Jual beli termaktub dalam Q.S Al Baqarah 275 dan 282.³

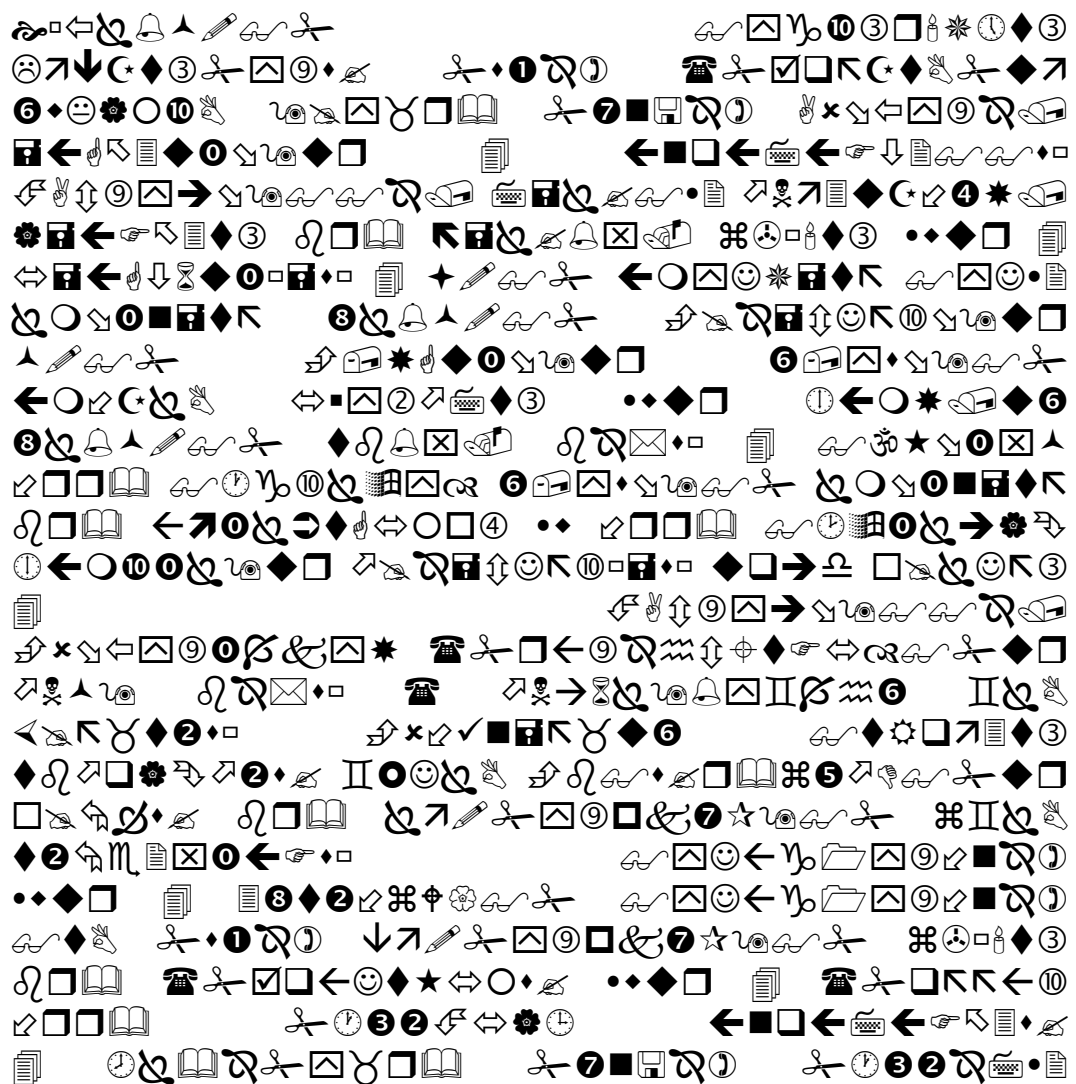


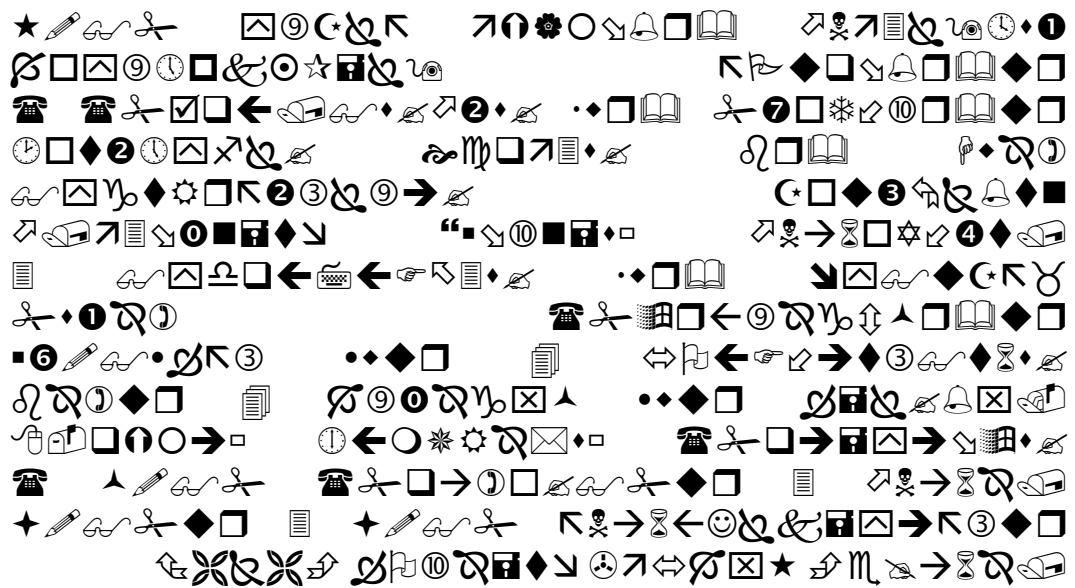
Artinya:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989, h. 69-70)

mengatakan: "Bahwa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba ".
 Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan
 riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari
 Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya
 dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya
 terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan
 mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al
 baqarah : 275).





Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (QS. Al baqarah : 282).

Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah. Rukunnya meliputi⁴:

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)
- 3) Keduanya tidak mubazir
- 4) Baligh

⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

b. Tentang obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat elative, sebab pada hakikatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

3) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjajnian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.

4) Mampu menyerahkannya

Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5) Mengetahui

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

c. Tentang lafaz

Lafaz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungannya antara ijab dan qabul tersebut. Dalam hal ini tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan Qabul.

Menurut ketentuan syariat, bahwa jika masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang tidak mampu untuk

mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan keijinan pada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁵

Pegadaian syariah sendiri, pada praktiknya tidak melakukan tinggitinggian harga pada mekanisme lelangnya. Hal ini didasarkan pada hadits yang berbunyi:

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. a. , dia berkata: Rasulullah SAW melarang orang kota menjual sesuatu atas nama orang pedalaman (dalam rangka penipuan). Rasulullah SAW juga melarang seseorang pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk memikat orang lain agar turut menawar, seseorang tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang masih sedang dalam penawaran orang lain, seseorang tidak boleh melamar perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain, dan seseorang tidak

⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *op. cit.* , h. 140.

*boleh berupaya agar seorang laki-laki menceraikan istrinya karena dia ingin menggantikan istri yang diceraikan itu.*⁶

3. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*).

4. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁷

Jika terdapat persyaratan; menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).

⁶ Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hadits no. 2140

⁷ *Ibid.* , hal. 59.

- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seijin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu di antaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela
(*'antharadhin*)
- b. Objek lelang harus halal dan bermafaat
- c. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi

menimbulkan perselisihan

- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR, Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

1. Operasional Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas, Pekanbaru, Riau

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain adalah:

a. Syarat-syarat Pemberian Pinjaman

Dalam memberikan pinjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) *Marhun* milik sendiri.
- 2) Foto copy tanda pengenal.
- 3) *Marhun* memenuhi persyaratan menurut ketentuan.

4) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai

materai dan KTP asli pemilik barang. Jika pemilik tidak bisa hadir.

5) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman

(FPP).

6) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn*

(SBR).

b. Jenis -jenis *marhun* yang dapat diterima sebagai jaminan

- 1) Barang-barang perhiasan emas atau berlian.
- 2) Kendaraan bermotor, seperti mobil (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- 3) Barang-barang elektronik, seperti televisi, radio, tape, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain.

c. Penggolongan Marhun

Pembagian golongan *marhun* didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran

- a) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Yunior
- b) Golongan B dan C oleh Penaksir Madya

- c) Golongan D dan E oleh penaksir Senior/Manajer Cabang

Pembagian golongan *marhun* berdasarkan besarnya nilai taksiran

Tabel 3

Penggolongan Marhun⁸

Golongan	Besarnya Taksiran
A	Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000
B	Rp.151.000 s/d Rp. 500.000
C	Rp. 501.000 s/d Rp.1.000.000
D	Rp.1.005.000 s/d Rp. 5.000.000
E	Rp. 5.010.000 s/d Rp. 10.000.000
F	Rp. 10.050.000 s/d Rp.20.000.000
G	Rp. 20.100.000 s/d Rp. 50.000.000
H	Rp. 50.100.000 s/d Rp. 200.000.000

b. Penentuan Uang Pinjaman

Besarnya *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada sisten konvensional, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari

⁸ Brosur Pegadaian Syariah

prosentase nilai taksiran juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya jasa simpan, untuk memudahkan dalam penetapan tarif, maka besarnya tarif dihitung atas dasar kelipatan nilai taksiran per Rp. 10.000

Contoh:

Apabila penaksir barang menentukan angka hasil hitungan Rp. 7.845.000 kemudian dalam surat edaran ditetapkan bahwa besarnya *marhun bih* adalah 80 % dari nilai taksiran, maka besarnya nilai *marhun bih* = 80% x Rp. 7.845.000 = Rp. 6.276.000

c. Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijaminakan pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan. Adapun tarif biaya administrasi yang sekarang berlaku di pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Tarif Biaya Administrasi⁹

Golongan	Tarif (Rp)
A	1.000
B	3.000
C	5.000
D, E	15.000
F, G, H	25.000

f. Jasa Simpan

Dalam akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin*. Atas penyimpanan *marhun*, *muajir* (yang menyewakan tempat untuk Unit Layanan Gadai Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama

⁹ Modul Materi Pendidikan Dan Pelatihan Aplikasi Gadai Syariah.

digadaikan dan merupakan pendapat bagi Unit Layanan Gadai Syariah. Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari. Untuk setiap kelipatan nilai taksiran *marhun* emas Rp. 10.000, tarif ditetapkan sebesar Rp. 45.,

1) Rumus Perhitungan Tarif Jasa Simpan

$$\text{Tarif Jasa Simpan} = N \times T \times W$$

Keterangan

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Angka tarif yang ditentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif.

W = Lama waktu pinjaman dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat dibagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjaman terkecil)

2) Tabel Tarif Jasa Simpan

Tabel 5

Tarif Jasa Simpan¹⁰

N o	Jenis Marhun	Perhitungan
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 90 x Jk
2	Elektronik, Mesin, Jahit, Sepeda, Alat	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 95 x Jk Wkt/10
3	Kendaraan	Taksiran/Rp.10.000 x Rp 100 x Jk Wkt/10

3) Pemberian Diskon

Diskon ini diberikan kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun bih* berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko *marhun bih* tidak dikembalikan oleh *rahin* menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan *marhun bih* maka

¹⁰ Modul Materi Pendidikan Dan Pelatihan Aplikasi Gadai Syariah

semakin kecil pula resiko bahwa *marhun bih* tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar. Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai “balas jasa” kepada *rahin* atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan dalam akad.

a) Besaran Diskon Jasa Simpan

Tabel 6

Besaran Diskon Jasa Simpan¹¹

Besaran MB	Diskon	Tarif setelah diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik	Kendaraan
1	2	3	4	5
>80 x taks.	0	90	95	100
70% - 79% x taks	10%	81	86	90
60% – 69 x taks	20%	72	76	80
50% - 59% x taks	30%	63	67	70
40% – 49% x taks	40%	54	57	60
30 %– 39 % x taks	50%	45	48	50
20 %– 29 % x taks	60%	36	38	40
10 %– 19 % x taks	70%	27	29	30
<10% x taks	80%	18	19	20

b) Rumus Jasa Simpan Setelah Diskon

Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

¹¹ Modul Materi Pendidikan Dan Pelatihan Aplikasi Gadai Syariah

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Tarif setelah diskon} \times \text{waktu} / 10$$

Contoh untuk tarif marhun kantong dengan MB 65% x taksiran, rumusnya adalah

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Rp. 72} \times \text{waktu} / 10$$

6. Sistem dan Prosedur Operasional Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru.

a. Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjam

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah sang atlah mudah yakni nasabah datang langsung ke *murtahin* (pegadaian syariah) dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh rahin. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya

kerugian. Selanjutnya murtahin menyerahkan uang pinjaman tanpa ada potongan apapun disertai SBR.

b. Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjam

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan Surat Bukti Rahn kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan SBR kepada bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (*marhun*). Barang gadai dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan *akad* yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam *akad*. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, yaitu dengan cara:

1) Ulang Rahn (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai

jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan. Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda UR yang artinya Ulang Rahn.

2) Minta Tambahan (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

3) Angsuran (A)

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang rahn lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada

rahin dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda A yang artinya Angsuran.

4) Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.

Apabila sampai batas waktu *marhun bih* tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang, maka barang jaminan (*marhun*) akan dilelang oleh pegadaian. Pelunasan pinjaman dapat dilaksanakan dengan cara:

- 1) *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- 2) Menjual *marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

7. Sistem Pelaksanaan Lelang Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas

Pekanbaru.

Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas, Pekanbaru, Riau. pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis, *murtahin* memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

a. Persiapan Penjualan Marhun.

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan Cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:

- 1) 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk)
- 2) 2 orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi)

b. Waktu dan Tata Cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* diatur sebagai berikut:

- 1) Waktu penjualan *marhun* adalah setiap hari Sabtu
- 2) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo pada hari Sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan)
- 3) Khusus untuk *marhun* emas, karena pada hari Sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari Jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari Kantor Pusat atau harga dari 3 toko setempat
- 4) Sedangkan untuk *marhun* non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
- 5) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari Sabtu tersebut.
- 6) Untuk *marhun* yang tidak terjual pada hari Sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (*show room/case*)
- 7) Pelunasan administratif gunakan
 - a) Untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta register barang tidak laku.

b) Untuk *marhun* yang laku, maka uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

a. Harga Minimum Penjualan *Marhun*.

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua *marhun* harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga penjualannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang ini harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan/*rahin*, maka barang tersebut ditunda penjualannya dan petugas menghubungi pemilik agar melakukan penebusan/mencicil atau meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan penjual terhadap *marhun* tersebut sesuai kesepakatan pada akad yang telah ditandatangani.
- 2) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.
- 3) Berhubung ULGS tidak melaksanakan lelang, sehingga tidak terbebani

bea lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 2,7% dengan harga lakunya penjualan. Biaya ini ditetapkan pada saat panitia penjualan melakukan taksir ulang.

b. Barang yang Tidak Laku Dijual

- 1) Barang yang tidak laku dijual adalah *marhun* yang tidak laku dijual pada hari Sabtu pada saat dilaksanakannya penjualan.
- 2) Terhadap barang tidak laku dijual ini dilakukan penebusan administratif sebesar uang pinjaman.
- 3) Setiap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.
- 4) Selain di dalam kitir, dibuat register barang yang tidak laku dijual yang memuat data tentang nomor dan bulan kredit, kriteria *marhun* taksiran, uang pinjaman, jasa simpan, HMP, LJR, tanggal penjualan.
- 5) Terhadap *marhun* yang tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Dilakukan mutasi antar kantor cabang
 - b) mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kitir wilayah/ Kantor Pusat untuk mendapatkan pengesahan.

e. Ilustrasi Distribusi Pendapatan Lelang

Berikut ini adalah ilustrasi distribusi pendapatan lelang di Pegadain Syariah Cabang Soebrantas Panam, Pekanbaru

Seorang Rahin memiliki uang pinjaman sebesar Rp. 90.000 dan jasa simpan Rp. 10.200 sampai masa jatuh tempo habis, Rahin tetap tidak dapat melunasi pinjamannya. Maka oleh pegadaian barang jaminannya dengan hasil lelang sebagai berikut:

Nilai jual lelang Biaya-biaya lelang: Rp.121.714

Biaya – lelang pemberian :

- Bea lelang pembeli (1 % x NJL) Rp. 1.217

- Bea lelang penjual (1 % x NJL) Rp. 1.217

- Dana Sosial (0.7% x NJL) Rp. 852

Pendapatan Lelang

Rp. 3.286

Rp.125.000

Distribusi Pendapatan Lelang :

Pendapatan Lelang

Rp. 125.000

UP	Rp. 90.000	
SM	Rp. 10.200	
Bea lelang	<u>Rp. 3.286</u> +	
		Rp. <u>103.486</u>
Uang Kelebihan Hasil penjualan		Rp. 21.514

Pendapatan Lelang didistribusikan untuk uang pinjaman sebesar Rp. 90.000, jasa simpan Rp. 10.200 dan bea lelang sebesar Rp. 3.286. Dan kelebihannya sebesar Rp. 21.514 menjadi hak milik *rahin*.

2. Pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan analisis yaitu dengan cara pengumpulan data tentang metode pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas, Pekanbaru, Riau untuk kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan *marhun*, untuk mengetahui apakah implementasi ketentuan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas, Pekanbaru, Riau sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Kata sesuai sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sama dan tidak bertentangan dengan

pendapat, buah pikiran, penilaian. Dari kriteria kesesuaian sebagaimana tabel 1 maka analisis dengan membandingkan antara ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan implementasi metode lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas, Pekanbaru, Riau didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- 4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *rahin* terhadap *murtahin* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang

Soebrantas, Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a.

b. Sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam, Pekanbaru dalam praktiknya, *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin* oleh pegadaian, *marhun* tersebut dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap *marhun* yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka Pegadaian Syariah Cabang Panam, Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b.

c. Hasil Penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam, Pekanbaru hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang *rahin*, biaya

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial). Dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan *marhun*, maka Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

d. Kelebihan Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam, Pekanbaru hasil penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi hak milik *rahin*. Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada BAZIS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan tentang ‘Pelelangan Benda Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam Pekanbaru’ dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari Ekonomi Islam tentang penjualan *marhun* yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan *marhun*, dan kelebihan hasil penjualan *marhun*, operasional pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam, Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Syariat islam.

B. Saran

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah ada.
2. Kepada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru, supaya lebih mensosialisasikan pegadaian Syariah yang tentunya lebih menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim (2003), *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia.
- A. Djazuli (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih*.
- A. Jazuli dan I Nurol Aen (2001), *Usul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Jazuli Akhmad (2002), *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : STIE Widya Wiwaha.
- Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Cetakan Edisi Ke-Tiga 2004)
- Lewis K. Mervin(ed) Alound M. Latifa, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek dan Prospek*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta Cetakan Pertama 2007)
- Lubis, K, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika Cetakan Ke-2, Agustus 2000)
- Muh. Syafi'i Antonio (1999), *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- M. Nashiruddin Al-Albani (2005), *Ringkasan Shahih Muslim : Kitab Jual-Beli*, alih bahasa Elly Lathifah, Jakarta : Gema Insani Press.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf cetakan pertama, 5 april 1993)
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonosia Cetakan Pertama 2006)
- Sugiyono (2005), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Syamsudin, Lukman, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004)
- Sabiq, Sayyid, *FIQIH SUNNAH*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara Cetakan Pertama 2006)
- Sudarsono, Heru, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : PT. Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Cetakan Keempat, Januari 2007)